



PUTUSAN

Nomor 8026/Pdt.G/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat beralamat di (Rumah orang tua a.n Bpk. Rasdiman/.Ibu Oom) Kab. Bandung., selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, alamat Terakhir diketahui Penggugat beralamat di Kab. Bandung, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 8026/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 04 Desember 2020 sebagaimana perubahan pada tanggal 2 Februari 2021 (pencabutan gugatan hak asuh anak) pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tgl 15 November 2019 di hadapan pejabat PPN KUA Kec.Pacet-Kabupaten Bandung, dengan Kutipan Akta Nikah No.1335/65/XI/2012 tanggal 19 November 2012.

1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 8026/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal bersama di Kab. Bandung ;

3. Perlu Penggugat sampaikan bahwa sebenarnya Tergugat sebelumnya telah pernah mengajukan Permohonan Talak melalui Pengadilan Agama Soreang pada tgl. 27 Maret 2019 sesuai dengan Register Perkara No: 2266/Pdt.G/2019/PA.Sor, dan telah di Putus oleh Pengadilan Agama Soreang pada tgl.04 November 2019 sesuai dengan Putusan No.2266/Pdt.G/2019/PA.Sor ; Namun Tergugat selaku pemohon talak pada saat itu telah dua kali dipanggil untuk Ikrar Talak dan bahkan telah diberikan kesempatan waktu 6 bulan tepatnya hingga tanggal 24 Juni 2020 namun tetap tidak diindahkan, dan saat ini waktu untuk ikrar talak telah GUGUR, sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (4) KHI yang menyatakan :

“Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.”

4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK KANDUNG , Perempuan, lahir di Bandung tgl. 09-April-2006, yang hingga saat ini tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya ;

5. Bahwa mengingat anak-anak penggugat dan tergugat belum mumayyiz yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat hadhanah dari penggugat selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum mumayyiz tersebut, penggugat mohon pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan; “Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlonah dari ibunya;”

2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 8026/Pdt.G/2020/PA.Sor



6. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah atau mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran diakibatkan adanya Perselingkuhan antara suami saya (tergugat) dengan wanita lain bernama Lestari, hal tersebut diketahui oleh Penggugat pada akhir bulan Agustus 2019 ketika penggugat memeriksa HandPhone tergugat, dimana penggugat menemukan (memergoki) adanya chatting via Whatsapp atau komunikasi mesra antara suami (tergugat) dengan perempuan lain. Dan, bahkan pada tgl.28 April 2019 (ketika permohonan talak dahulu baru diajukan ke Pengadilan Agama Soreang) penggugat mendapat info bahwa Tergugat tengah melangsungkan pernikahan dengan perempuan selingkuhannya tersebut, sebagaimana dengan bukti-bukti Foto pernikahan Pemohon yang saat ini dimiliki Penggugat padahal Tergugat masih dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat atau belum resmi bercerai dengan penggugat; Jelas tindakan Tergugat adalah Tindak Pidana karena melakukan Perkawinan Terhalang sebagaimana diatur dalam KUHPidana.

7. Bahwa pada awal bulan Januari 2019 penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya dengan cara mengajak tergugat ngobrol berdua, tapi ternyata setelah rembukanpun tidak membuat adanya perubahan pada sikap tergugat, justru malah lebih memilih perempuan lain dari pada mempertahankan rumah tangganya.

8. Penggugat setelah mengetahui adanya dugaan perselingkuhan tergugat dengan perempuan dimaksud, sehingga pada tgl.18 Januari 2019 penggugat meminta kepada tergugat agar penggugat diantar atau dikembalikan kepada orang tua penggugat, namun pada saat tergugat dan penggugat sampai dirumah orang tua penggugat, tergugat malah membuat orang tua penggugat sangat tersinggung karena tergugat mengatakan kepada orang tua penggugat bahwa "barang yang sudah dibuang tidak akan dipungut lagi".

9. Mendengar bahasa tergugat sebagaimana dimaksud pada poin 6 diatas yang begitu kasar dan tergugat menganggap penggugat selaku seorang ibu yang telah melahirkan anak tergugat sendiri seperti barang yang tidak berguna, tentu keluarga besar penggugat sangat tersinggung.

3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 8026/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 8026/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 28 Desember 2020 dan tanggal 19 Januari 2021 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan perubahan pencabutan gugatan hak asuh anak;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai

4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 8026/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, NIK 3204304107920021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1335/65/XI/2012 tanggal 19 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan perias, alamat Kampung Cibaduyut Rata RT 004 RW 001 Desa Cibaduyut Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung, mengaku sebagai bibi Penggugat, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kab. Bandung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2019 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan sudah menikah;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;

5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 8026/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, alamat Kampung Cilastari RT 001 RW 030 Desa Alam Endah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung, mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpah sesuai agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kab. Bandung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2019 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan sudah menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akan tetapi pernah mendengar cerita Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu hingga sekarang;
- bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 8026/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa pemanggilan terhadap Tergugat dianggap cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan asli dari suatu akta autentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang

7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 8026/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jis.* Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karenanya maka Pengadilan Agama Soreang berwenang secara relatif memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Penggugat bahwa dirinya dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan telah terbukti;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai: a) sejak bulan Agustus 2019 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan sudah menikah b) antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi; dan c) sudah adanya usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah bibi Penggugat dan teman Penggugat serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 8026/Pdt.G/2020/PA.Sor



Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti yang ada, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa sejak bulan Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan sudah menikah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini,

9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 8026/Pdt.G/2020/PA.Sor



sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaedah fiqih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

ولاخير في اجتماع بين متغاضبين ومهما يكن اسباب هذا
النزاع خطيرا كان اوتا فيها

فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri";

د رالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya tentang hak asuh anak. Atas pencabutan tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 8026/Pdt.G/2020/PA.Sor



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., L.L.M.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.** dan **Noor Faiz, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Asep Dadan Hermawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., L.L.M.

Hakim Anggota II,

Noor Faiz, S.H.I., M.H.

11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 8026/Pdt.G/2020/PA.Sor



Panitera Pengganti,

Asep Dadan Hermawan, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Relas Panggilan I	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	410.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

12 dari 12 halaman
Putusan Nomor 8026/Pdt.G/2020/PA.Sor